

REALISASI *CITIZENSHIP EDUCATION* MELALUI PROGRAM KAMPUS MERDEKA

REALIZATION OF CITIZENSHIP EDUCATION THROUGH THE KAMPUS MERDEKA PROGRAM

Agil Nanggala*, Karim Suryadi

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia
Jalan Dr. Setiabudi Nomor 229 Bandung 40154, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 09 Februari 2021

Disetujui : 21 Juni 2021

Keywords:

realization, citizenship education, Kampus Merdeka

Kata Kunci:

realisasi, *citizenship education*, Kampus Merdeka

***) Korespondensi:**

E-mail: ardisaputra169@gmail.com

Abstract: this study aimed to describe the realization of citizenship education in the learning practice of the Kampus Merdeka program and to analyze the involvement of various parties in the effort to realize citizenship education in the Merdeka Campus program. This study applied a qualitative approach with a literature study method carried out through several activities, namely collecting library data, reading and taking notes, and processing information according to the formulation of the problem discussed. The realization of citizenship education in the learning practice of the Kampus Merdeka program was executed through several activities that directly interact with the community, including research, entrepreneurship, humanitarian projects, independent projects, and thematic Real Work Lectures (KKN) or village building. Efforts to realize citizenship education in the Kampus Merdeka program required several parties, namely the government, academia, the community or society, the private sector, and the media.

Abstrak: tujuan kajian ini adalah mendeskripsikan realisasi *citizenship education* dalam praktik pembelajaran program Kampus Merdeka serta menganalisis keterlibatan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan *citizenship education* dalam program Kampus Merdeka. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas. Realisasi *citizenship education* dalam praktik pembelajaran program Kampus Merdeka dilakukan melalui beberapa aktivitas yang langsung bersinggungan dengan masyarakat diantaranya yaitu riset, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan Kuliah Kerja Nyata tematik atau membangun desa. Upaya merealisasikan *citizenship education* dalam program Kampus Merdeka perlu melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta, dan media.

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial yang mencerminkan *citizenship education* merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Hal ini menjadi orientasi yang melibatkan berbagai pihak untuk mewujudkan keadilan serta mampu mewujudkan kesejahteraan umum. Realisasi *citizenship education* dalam kehidupan masyarakat mengakomodasi upaya konkrit untuk mewujudkan warga negara

yang beradab. Konsep *citizenship education* pada dasarnya merupakan arti dari keilmuan pendidikan kewarganegaraan secara luas, karena menjadi wahana untuk menganalisis dan merefleksikan cita-cita dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Konsep *citizenship education* mengakomodasi upaya ilmiah untuk mengatasi berbagai problematik yang kompleks dalam masyarakat, dengan melibatkan berbagai pihak

dan kohesi sosial masyarakat agar terwujud kolaborasi sekaligus sinergi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan wahana pendidikan demokrasi, hukum, dan politik bagi masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan menjadi upaya ilmiah untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat serta mengatasi berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi diperlukan bagi masyarakat agar mampu berdaya saing dan memiliki pengetahuan politik yang baik (Nasution, 2019). Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mampu mengatasi masalah dalam masyarakat tetapi juga mampu mewujudkan masyarakat yang demokratis dan sejahtera secara sosial (Aulia & Arpanudin, 2019). Orientasi tersebut menegaskan bahwa eksistensi pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas pada bidang akademik saja tetapi bersifat komprehensif dan elaboratif karena mengakomodasi upaya pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang keilmuan memiliki orientasi khusus yaitu mewujudkan kehidupan bangsa dengan berdasar pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan data statistik total penduduk Indonesia mencapai 248,8 juta jiwa, dengan 28,55 juta penduduk berada dalam kemiskinan dan sebanyak 15,55 juta penduduk mengalami pengangguran terbuka (Badan Pusat Statistik, 2013). Realisasi *citizenship education* melalui program Kampus Merdeka mengarah pada upaya untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang berdikari serta memiliki kohesi sosial yang kuat.

Program Kampus Merdeka menjadi salah satu upaya untuk merealisasikan konsep *citizenship education* agar dapat terlaksana secara efektif. Keefektifan ini dapat dilihat pada kebijakan program Kampus Merdeka yang mengakomodasi pembelajaran secara teoritis (dilaksanakan dalam kelas) dan secara praktis (langsung dalam masyarakat). Program Kampus Merdeka bertujuan untuk membentuk mahasiswa agar mampu menjadi warga negara yang dapat diandalkan. Pendidikan kewarganegaraan harus dikolaborasikan dengan program Kampus Merdeka agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Nanggala & Suryadi, 2020). Pembelajaran dalam program Kampus Merdeka berorientasi pada

pembentukan warga negara yang beradab sesuai dengan amanat pendidikan kewarganegaraan.

Praktik pembelajaran dalam program Kampus Merdeka mengarah pada beberapa aktivitas yaitu pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, upaya kemanusiaan, kewirausahaan, proyek independen, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik atau membangun desa. Praktik pembelajaran program Kampus Merdeka pada dasarnya bertujuan untuk memajukan kehidupan masyarakat. Hal ini relevan dengan makna pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang berorientasi pada terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan sejahtera. Program Kampus Merdeka menjadi salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat agar mampu mengatasi berbagai hambatan dan tantangan yang semakin kompleks.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa *civitas academica* diwajibkan untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kewajiban ini semakin mempertegas bahwa orientasi pengembangan keilmuan tidak hanya berfokus pada upaya mencerdaskan mahasiswa dan mewujudkan inovasi nasional semata tetapi juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat (Tiara & Yarni, 2019). Upaya pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan lebih bersifat holistik karena mampu meminimalisir terjadinya masalah yang sama atau masalah baru dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan memiliki dimensi keilmuan sosiokultural yang menjadikan masyarakat sebagai salah satu orientasi keilmuannya. Pendidikan kewarganegaraan pada dimensi sosiokultural bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan gambaran terkait permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat perlu menjadi orientasi dari berbagai disiplin ilmu pada era modern seperti sekarang ini. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pendidikan kewarganegaraan tetapi juga seluruh disiplin ilmu tanpa memandang rumpun. Adanya kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu sangat dibutuhkan agar upaya penanganan permasalahan yang dialami masyarakat menjadi lebih komprehensif. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan informasi terkait ketimpangan antara cita-cita dan realitas demokrasi, serta

kemakmuran dalam kehidupan masyarakat (Yuniarto, 2020). Pendidikan kewarganegaraan memberikan informasi objektif terkait kualitas demokrasi dalam masyarakat sebagai refleksi atas distorsi cita-cita demokrasi dengan kenyataan dalam praktik.

Realisasi *citizenship education* dapat berjalan secara efektif apabila didukung dengan adanya keterlibatan dari berbagai pihak. Mahasiswa sebagai salah satu *civitas academica* dapat merealisasikan *citizenship education* dengan cara mengabdikan secara sukarela kepada masyarakat. Masyarakat juga harus turut serta dalam upaya pembangunan agar *citizenship education* dapat terealisasikan. Pemerintah yang responsif terhadap berbagai masalah dalam masyarakat serta keterlibatan pihak swasta dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berdikari menjadi konsep ideal dari pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* (Widiono, Ifrana, & Firdausia, 2021). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka permasalahan yang dibahas dalam kajian ini yaitu realisasi *citizenship education* dalam praktik pembelajaran program Kampus Merdeka, serta keterlibatan berbagai pihak dalam upaya merealisasikan *citizenship education* dalam program Kampus Merdeka.

METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Kajian studi literatur dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas (Wibowo & Wahono, 2017). Prosedur dalam kajian studi literatur dilakukan dengan menggali ide umum tentang pokok permasalahan yang akan dibahas, mencari informasi yang mendukung topik bahasan, mencari dan menemukan sumber data, serta melakukan *review* terhadap informasi yang telah diperoleh dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Sumber data dalam kajian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa artikel jurnal sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi milik negara untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam kajian, baik secara teoritis atau praktis. Analisis data dalam kajian ini menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman

yang meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realisasi *Citizenship Education* dalam Praktik Pembelajaran Program Kampus Merdeka

Praktik pembelajaran pada program Kampus Merdeka sangat beragam karena mengakomodasi pembelajaran di dalam atau di luar kelas. Praktik pembelajaran dalam program Kampus Merdeka dalam kajian akan diuraikan berdasarkan perspektif pendidikan kewarganegaraan. Konsep *citizenship education* bersifat komprehensif sehingga diperlukan upaya akademik dengan tujuan meminimalisir terjadinya implementasi praktik pembelajaran yang pragmatis dan prosedural (Sutrisno, dkk., 2021). Praktik pembelajaran yang pragmatis dan prosedural tidak akan mampu mendukung perkembangan mahasiswa secara khusus dan masyarakat secara umum. Realisasi *citizenship education* membutuhkan adanya suatu moralitas serta kesukarelaan dari berbagai pihak.

Praktik pembelajaran dalam program Kampus Merdeka meliputi beberapa aktivitas yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, diantaranya yaitu riset, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan KKN tematik atau membangun desa. Praktik pembelajaran lain dalam program Kampus Merdeka yaitu pertukaran pelajar dan asistensi mengajar pada satuan pendidikan yang menekankan pada pembelajaran di dalam kelas (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2020). Praktik pembelajaran dalam program Kampus Merdeka berupa magang perlu ditelaah, direfleksikan secara utuh, atau diberi indikator yang bersifat tegas sehingga tidak berdampak negatif terhadap lahirnya tenaga kerja murah.

Praktik pembelajaran riset atau penelitian berorientasi pada pembentukan sikap kritis mahasiswa agar mampu mengatasi problematika dalam masyarakat. Penelitian atau riset merupakan kewajiban *civitas academica* yang diharapkan dapat berdampak nyata dalam upaya membangun masyarakat yang berdaya dan berdikari. Orientasi tersebut selaras dengan substansi pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang menghendaki terwujudnya masyarakat madani berbasis Pancasila dan UUD NRI 1945 (Setiarsih, 2017). Struktur keilmuan

pendidikan kewarganegaraan berupaya untuk mengatasi berbagai problematika masyarakat secara holistik yang melibatkan semua pihak.

Riset atau penelitian sebagai realisasi *citizenship education* harus didasarkan pada realitas sosial. Jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan tersebut salah satunya yaitu penelitian terapan. Hal ini didukung dengan adanya kajian pendidikan kewarganegaraan secara luas (*citizenship education*) yang berisi materi mengenai berbagai problematika dan fenomena sosial, baik yang bersifat umum atau khusus. Kajian tersebut harus ditelaah secara kritis agar mampu memberikan solusi ilmiah yang kapabel untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Adha, 2020). Substansi keilmuan dan praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan mengarah pada realitas dan dinamika kebangsaan, problematika masyarakat, realitas sosial dan kebudayaan, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang merupakan wahana telaah dan refleksi terkait kesenjangan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Praktik pembelajaran kewirausahaan bertujuan untuk menumbuhkan minat serta bakat berwirausaha mahasiswa, sehingga dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Faktanya orientasi tersebut selaras dengan substansi pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang menghendaki terwujudnya masyarakat yang mandiri pada bidang ekonomi, sehingga mampu membantu negara dalam merealisasikan kesejahteraan sosial. Konsep *citizenship education* memandang bahwa ekonomi yang bersifat kreatif dan kerakyatan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang beradab. Konsep kemandirian atau berdikari mengarah pada kegiatan berwirausaha yang merepresentasikan konsep *economic citizenship* (Rubei, 2014). *Economic citizenship* merupakan sosialisasi konsep dan praktik ekonomi kewarganegaraan dalam masyarakat, sehingga memiliki kemandirian ekonomi dengan memberdayakan berbagai potensi bernilai ekonomi. *Economic citizenship* dalam praktiknya dapat dilakukan secara personal atau komunitas.

Realitas modernisasi menjadi peluang dalam mewujudkan *economic citizenship* yang memiliki kebermanfaatn tinggi, karena strategi dan praktik

pemasaran produk kewirausahaan yang lebih efektif dan efisien. Konsep *economic citizenship* yang berfokus pada ekonomi kerakyatan atau komunitarian bertujuan agar secara moralitas dapat dinikmati oleh berbagai pihak. *Citizenship education* pada ranah *economic citizenship* berupaya mengubah mental bangsa Indonesia dari pekerja menjadi penyedia lapangan pekerjaan. *Economic citizenship* memberikan pemahaman ekonomi kerakyatan kepada masyarakat agar secara sadar dapat terlibat dalam memajukan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mengarah pada penguatan daya saing secara global (Sutrisno, 2019). *Economic citizenship* juga mendorong mahasiswa untuk berwirausaha secara jujur dan adil serta mengakomodasi kewirausahaan dalam suatu komunitas.

Praktik pembelajaran proyek kemanusiaan bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan, mentransformasikan kepekaan sosial, serta menjunjung tinggi agama, etika, dan moral dalam rangka membentuk karakter mahasiswa yang unggul. Orientasi tersebut sangat relevan dengan substansi pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education*. Pendidikan kewarganegaraan sebagai *citizenship education* berupaya untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila, serta mengarah pada *citizenship virtue* (keadaban warga negara). Pendidikan kewarganegaraan mengarah pada upaya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan kepada seluruh warga negara agar mampu menjadi masyarakat yang madani atau masyarakat yang diharapkan oleh bangsa Indonesia (Fusnika, 2014). Kehidupan yang harmonis, makmur, adil, aman, serta memiliki kepekaan sosial menjadi suatu kekuatan dalam mengatasi masalah secara bersama-sama. Keadaban masyarakat mencerminkan suatu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Praktik pembelajaran proyek kemanusiaan berorientasi pada realisasi *citizenship education* dalam bidang transformasi nilai-nilai kemanusiaan. Transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan kepekaan sosial sangat penting untuk merealisasikan kehidupan masyarakat berbasis Pancasila dan UUD NRI 1945, karena menjadi modal sosial bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tuntutan zaman. Konsep *citizenship education* menghendaki terwujudnya masyarakat yang

bermoral dan bijaksana dalam upaya merealisasikan keadilan sosial secara menyeluruh (Mardawani & Kurniati, 2017). Nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya mewujudkan warga negara yang Pancasilais (Suardi, dkk., 2019). Nilai-nilai kemanusiaan merupakan basis moral untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Praktik pembelajaran proyek independen bertujuan untuk mengoptimalkan minat, bakat, dan inovasi mahasiswa agar mampu berprestasi, dalam konteks mengatasi masalah sosial dalam masyarakat secara kolaboratif dan kreatif. Orientasi ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan mahasiswa tetapi juga masyarakat sebagai suatu pendidikan demokrasi, hukum, dan politik. Pendidikan kewarganegaraan berorientasi untuk memperkuat berbagai keterampilan warga negara yang nantinya dapat dijadikan sebagai modal untuk berkarir (Wadu, Ladamay, & Jenia, 2020). Proyek independen merupakan pembelajaran berbasis kurikuler dan sosiokultural yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sosial melalui pengembangan keilmuan.

Proyek independen merupakan wahana dalam mewujudkan kolaborasi masyarakat dengan mahasiswa yang mengarah pada penyelesaian problematika yang beragam dalam lingkungan sosial. Realisasi konsep *citizenship education* dalam kehidupan masyarakat terwujud karena adanya keterlibatan (*citizenship engagement*) dari berbagai pihak, khususnya *civitas academica* dan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan berupaya merealisasikan masyarakat demokratis yang mampu mengoptimalkan partisipasi publik dalam memajukan kehidupan sosiokultural (Mufidah, 2020). Pengembangan *body of knowledge* pendidikan kewarganegaraan tidak hanya untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai warga negara yang baik dan cerdas, tetapi juga berfokus dalam upaya membangun masyarakat yang madani.

Praktik pembelajaran KKN tematik atau membangun desa bertujuan untuk menumbuhkan sifat kepemimpinan mahasiswa, mengoptimalkan potensi desa, serta memperkuat keterlibatan dari berbagai pihak. Konsep *citizenship education* melalui KKN tematik atau membangun desa mengarah pada terwujudnya pembelajaran yang berdampak nyata dan bermakna bagi mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan dapat berkolaborasi

dengan *service learning* untuk menghasilkan program yang bersifat komprehensif, membentuk kesukarelaan mahasiswa, serta memperkuat keterlibatan masyarakat (Karliani, 2014). KKN tematik atau membangun desa diharapkan dapat menumbuhkan sikap kepemimpinan dan kepekaan sosial dalam diri mahasiswa untuk mengatasi berbagai persoalan dalam masyarakat.

Realisasi *citizenship education* melalui KKN atau *service learning* merupakan strategi untuk memperkuat kohesi sosial masyarakat. Konsep tersebut menghendaki adanya kesadaran serta partisipasi dari *civitas academica* dan masyarakat. Model *service learning* menjadi wahana strategis pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam masyarakat yang berfokus pada transformasi sikap kepedulian sosial, nilai kemanusiaan, keterampilan sosial, keterlibatan, kolaborasi, dan komitmen (Jerome, 2012). Konsep *service learning* merupakan mitra mahasiswa untuk belajar mengenai realitas kehidupan secara langsung sekaligus menjadi sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh pada pembelajaran di dalam kelas.

Keterlibatan Berbagai Pihak dalam Upaya Merealisasikan *Citizenship Education* dalam Program Kampus Merdeka

Keterlibatan warga negara dalam berbagai aktivitas masyarakat merupakan bentuk kesadaran dan kesukarelaan yang mencerminkan keadaban warga negara. Realisasi *citizenship education* dalam kehidupan masyarakat tidak dapat berlangsung secara efektif apabila hanya dilakukan oleh *civitas academica* saja. Realisasi *citizenship education* melalui program Kampus Merdeka berdasar pada konsep *pentahelix* yang menghendaki keterlibatan dari berbagai pihak yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat atau komunitas, swasta, serta media. Model *pentahelix* tidak hanya digunakan untuk mengembangkan pariwisata nasional tetapi juga dapat dioptimalkan untuk realisasi *citizenship education* (Yuniningsih, Darmi, & Sulandari, 2019). Keterlibatan ini diharapkan mampu menciptakan suatu kolaborasi dan efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Pemerintah memiliki peran penting untuk merealisasikan konsep *citizenship education* dalam kehidupan sosial masyarakat, karena pemerintah merupakan mandataris rakyat dan konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Keterlibatan pemerintah dalam realisasi

citizenship education dapat dilakukan melalui pendidikan atau sosialisasi, pendampingan, kemudahan birokrasi, serta pengawasan yang memadai. Peran pemerintah harus berfokus dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, memberikan pelayanan berkualitas, mengefektifkan pembangunan fasilitas, memperkuat kompetensi SDM, serta membangun kehidupan yang demokratis dan partisipatif (Arifin, 2017). Pemerintah memiliki posisi strategis dalam menyusun dan mengelola anggaran negara, sehingga diperlukan suatu ketelitian dan integritas dalam merealisasikan anggaran tersebut untuk pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan mewujudkan keadilan sosial.

Pemerintah perlu mengaplikasikan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan melalui perencanaan, aplikasi, pengawasan, dan evaluasi internal yang tidak bersifat seremonial. Pemerintah perlu mengidentifikasi potensi masyarakat, baik pada peningkatan kehidupan yang demokratis dan partisipatif atau pada pengoptimalan potensi ekonomi desa. Pembentukan masyarakat yang sejahtera dan berdikari adalah tujuan dari *citizenship education*. Pemerintah memiliki legitimasi yang kuat untuk mengajak berbagai pihak agar terlibat dalam implementasi kebijakan Kampus Merdeka yang mengarah pada *citizenship education*.

Upaya realisasi *citizenship education* dari segi akademik mengarah pada langkah konkrit dalam bentuk pemikiran berbasis ilmiah untuk mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat. Akademisi harus memiliki integritas dan moralitas dalam mengabdikan eksistensinya untuk kesejahteraan masyarakat yang tidak terbatas pada upaya mengembangkan disiplin keilmuannya. Akademisi mempunyai eksistensi penting dalam upaya memajukan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat melalui elaborasi keilmuan dan inovasi yang komprehensif (Mukhlis, 2018). Kedudukan akademisi merupakan bagian integral dari perguruan tinggi yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengabdian masyarakat. Hal ini selaras dengan Tri Dharma perguruan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Undang-undang tersebut menjadi landasan penting bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

Akademisi harus memiliki kreativitas dan inovasi tanpa batas sebagai upaya mengembangkan keilmuan nasional dan modal akademik untuk mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat. Akademisi harus memiliki inisiatif untuk memberikan sosialisasi terkait berbagai masalah dalam masyarakat kepada pihak yang berwenang agar dapat dilakukan upaya penanganan yang bersifat efektif dan cekatan. Akademisi perlu memiliki keseriusan dalam mengaplikasikan program Kampus Merdeka sehingga konsep *citizenship education* dapat terealisasi melalui kesadaran dan kesukarelaan dari dosen dan mahasiswa untuk mengabdikan pada masyarakat.

Komunitas atau masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya realisasi *citizenship education* di masyarakat. Keterlibatan komunitas atau masyarakat dapat dilakukan dengan memperkuat kohesi sosial, aktif dalam menginformasikan apabila terdapat masalah, serta mendukung keterlibatan pemerintah, akademisi, swasta, dan media dalam melaksanakan pengabdian masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan, baik pada tahap perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh pembelajaran politik yang bersifat demokratis dengan berbasis pada kebutuhan (Susetawan, Mulyono, & Roniardin, 2018). Komunitas atau masyarakat perlu memiliki kekuatan sosial yang kapabel dalam mengatasi berbagai hambatan dan tantangan sosial yang semakin dinamis.

Substansi mengenai kohesi sosial masyarakat atau komunitas merupakan modal sosial dalam mewujudkan masyarakat madani yang terlibat secara sukarela dalam program pembangunan. Pandangan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam program pembangunan tentu menjadi langkah awal untuk melakukan habituasi demokrasi serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Masyarakat perlu memiliki kebijaksanaan yang tinggi dalam menelaah dan merefleksikan segala hal mengenai pembangunan. Masyarakat harus menerima niat baik dari berbagai pihak terutama dosen dan mahasiswa sebagai kaum akademisi. Para akademisi menjadi pelaksana utama dari program Kampus Merdeka sebagai suatu praktik pembelajaran yang bermakna untuk memajukan masyarakat secara ilmiah.

Swasta perlu dilibatkan dalam program pembangunan agar tidak fokus untuk mencari profit saja tetapi turut membangun masyarakat

yang berdaya dan beradab. Eksistensi pihak swasta diperlukan agar implementasi program Kampus Merdeka yang mengarah pada realisasi *citizenship education* dalam masyarakat dapat tercapai. Swasta dalam praktiknya dapat mendukung berbagai program positif yang diadakan oleh mahasiswa. Swasta harus mampu melaksanakan kolaborasi dengan masyarakat sebagai suatu langkah konkrit dalam memberdayakan masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 menjelaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan mengarah pada kesejahteraan sosial dan optimalisasi pelayanan publik. Praktik keterlibatan yang dapat dilakukan swasta diantaranya yaitu melalui investasi, pembukaan lapangan pekerjaan, serta sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat (Pambudy & Syairozi, 2019). Eksistensi swasta cukup penting dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Keterlibatan swasta harus mengarah pada optimalisasi peran sebagai kesatuan atau organisasi non pemerintah dan individu yang memiliki berbagai program berkualitas dalam memajukan kehidupan masyarakat. Realitas modernisasi mengakibatkan eksistensi swasta cukup penting dalam mengefektifkan program pembangunan yang mengarah pada terwujudnya kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pihak swasta juga dapat menjadi mitra strategis bagi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran program Kampus Merdeka. Realisasi konsep *citizenship education* dalam masyarakat mengakomodasi terwujudnya *economic citizenship* yang mengarah pada upaya mewujudkan masyarakat yang berdikari melalui praktik kewirausahaan dan optimalisasi potensi desa berbasis komunitas.

Peran media mengarah pada upaya untuk memberikan informasi yang objektif mengenai realitas dan problematika dalam masyarakat kepada pemerintah, akademisi, dan swasta melalui praktik pemberitaannya. Eksistensi media perlu menjadi wahana pendidikan politik dan demokrasi bagi masyarakat melalui programnya yang berkualitas dan mendidik. Wawasan dan pengetahuan masyarakat dapat meningkat dengan adanya media sebagai fasilitator. Media memiliki peran penting untuk mengubah lingkungan sosial karena bersifat modern dan kritis yang menyelaraskan program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat (Khatimah, 2018).

Pemberitaan media di Indonesia memiliki konsep bebas yang bertanggung jawab untuk membantu merealisasikan *citizenship education* melalui program Kampus Merdeka. Kolaborasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat dapat tercipta dengan adanya media sebagai sumber informasi yang valid dan komprehensif.

Eksistensi media mampu menjadi perantara aspirasi masyarakat kepada pemerintah atau pihak lain. Media memiliki peran yang sangat penting karena mampu mengakomodasi terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis. Media perlu memberikan pelatihan mengenai konsep jurnalisme kewarganegaraan atau *citizenship journalism* yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melatih kompetensi kewarganegaraan sebagai realisasi dari *citizenship education*. Media dalam praktiknya perlu memberikan pemberitaan yang berimbang, baik yang bersifat *indepth report* dan kritis atau yang bersifat ulasan positif karena pemberitaan media turut berdampak pada persepsi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran program Kampus Merdeka yang dilakukan pada masyarakat seharusnya diberitakan oleh media. Hal ini dapat menjadi bukti bahwa mahasiswa sebagai generasi muda masih memiliki kepekaan sosial untuk mengabdikan pada masyarakat.

SIMPULAN

Realisasi *citizenship education* dalam praktik pembelajaran program Kampus Merdeka dilakukan melalui beberapa aktivitas yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, diantaranya yaitu riset, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, proyek independen, dan KKN tematik atau membangun desa. Upaya merealisasikan *citizenship education* dalam program Kampus Merdeka melibatkan beberapa pihak yaitu pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta, dan media. Keterlibatan pemerintah dilakukan melalui pendidikan atau sosialisasi, pendampingan, kemudahan birokrasi, serta pengawasan yang memadai. Akademisi berperan dalam mengembangkan keilmuan nasional dan modal akademik untuk mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat. Keterlibatan komunitas atau masyarakat dapat dilakukan dengan memperkuat kohesi sosial serta aktif dalam menginformasikan apabila terdapat masalah. Swasta dapat melakukan

investasi, pembukaan lapangan pekerjaan, serta sosialisasi dan pelatihan untuk masyarakat dalam upaya mendukung realisasi *citizenship education*. Peran media mengarah pada upaya untuk memberikan informasi yang objektif terkait realitas dan problematika dalam masyarakat kepada pemerintah, akademisi, dan swasta melalui praktik pemberitaannya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adha, M. M. (2020). Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(1), 121-138.
- Arifin, M. (2017). Peran Pemerintah Desa terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (Studi Kasus Desa Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene). *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2(1), 14-26.
- Aulia, S. S., & Arpanudin, I. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Lingkup Sosiokultural Pendidikan Non-Formal. *Jurnal Citizenship Education*, 3(1), 1-12.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Statistik Indonesia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Fusnika. (2014). Pembinaan Citizenship Disposition Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1), 50-57.
- Jerome, L. (2012). Service Learning and Active Citizenship Education in England. *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(1), 59-70.
- Karliani, E. (2014). Membangun Citizenship Engagement melalui Model Service Learning untuk Memperkuat Karakter Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 23(2), 71-78.
- Khatimah, H. (2018). Posisi dan Peran Media dalam Kehidupan Masyarakat. *Tasamuh*, 16(1), 119-136.
- Mardawani, & Kurniati, A. (2017). Model Pembinaan Rasa Kebangsaan melalui Citizenship Education pada Masyarakat Entikong Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 41-47.
- Mufidah, N. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi dalam Mewujudkan Smart and Good Citizen. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 259-269.
- Mukhlis, B. M. (2018). Kolaborasi antara Universitas, Industri dan Pemerintah dalam Meningkatkan Inovasi dan Kesejahteraan Masyarakat: Konsep, Implementasi dan Tantangan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 1(1), 31-43.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen*, 9(2), 10-23.
- Nasution, A. R. (2019). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(2), 201-212.
- Pambudy, A. P., & Syairozi, M. I. (2019). Analisis Peran Belanja Modal dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya pada Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 26-39.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62.
- Rubei, M. A. (2014). Integrasi Nilai-Nilai Kewirausahaan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Economic Citizenship (Ekonomi Warga Negara). *Jurnal Citizenshipus*, 14(2), 54-73.
- Setiarsih, A. (2017). Diskursus Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*,

- 5(2), 76-85.
- Suardi., Herdiansyah, Herdianty., R., & Mutiara, I. A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Jaya Negara Makassar. *Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(1), 22-29.
- Susetiawan, Mulyono, D. C., & Roniardin, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 109-118.
- Sutrisno, A. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 28(1), 18-30.
- Sutrisno, Sapriya, Komalasari, K., & Rahmad. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Proyek Warga Global dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 155-164.
- Tiara, M., & Yarni, M. (2019). Pendidikan Karakter Berwawasan Sosiokultural di SMA Kota Padang. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 297-302.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan melalui Program Koperasi Serba Usaha. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 116-125.
- Wibowo, A. P., & Wahono, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan: Usaha Konkret untuk Memperkuat Multikulturalisme di Indonesia. *Jurnal Citizenships: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 198-202.
- Widiono, A., Ifrana, S., & Firdausia, K. (2021). Implementasi Merdeka Belajar melalui Kampus Mengajar Perintis di Sekolah Dasar. *Metodik Didaktik*, 16(2), 102-107.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi*, 9(1), 56-72.
- Yuniningsih, T., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelix dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84-93.